

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat. Posisi seperti itu menempatkan peran koperasi sebagai jalur utama dalam pengembangan system ekonomi kerakyatan.

Peran koperasi itu perlu dipertahankan karena koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat penting di dalam system perekonomian nasional Indonesia. Dengan demikian koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi kerakyatan. Sebagai gerakan ekonomi, koperasi diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koperasi sebagai badan usaha, tetap terikat pada prinsip-prinsip bisnis dan manajemen modern. Dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang pokok-pokok perkoperasian dijelaskan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹ Dalam hal ini berarti suatu koperasi memiliki anggota dalam bentuk kumpulan orang-

¹ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*. (Jakarta :Erlangga, 2005), p. 18

orang atau kumpulan dari beberapa koperasi. Sebagai badan usaha yang merupakan perwujudan dari usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggotanya. Keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama, tujuan yang sama, dan rasa kebersamaan yang tinggi.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan motivasi masyarakat di Indonesia yakni berasaskan kekeluargaan. Keberadaan koperasi yang semakin marak dikota-kota maupun didesa menunjukkan peranannya dalam membantu perekonomian Indonesia.

Dalam kehidupan koperasi cirri demokratis merupakan salah satu cirri yang dimiliki oleh koperasi, dimana partisipasi anggota cukup penting untuk diperhatikan sebagai factor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Partisipasi anggota koperasi dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan koperasi dan tercermin dari berbagai aktivitas. Mubyarto menjelaskan bahwa, “ Dalam tata ekonomi usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan, kita lebih mementingkan manusia atau peran serta orang seorang dari pada modal.”² Berdasarkan pernyataan ini maka peran serta seluruh anggota memegang peranan yang penting dalam kehidupan koperasi. Terwujud tidaknya tujuan koperasi ditentukan pula oleh besarnya peran serta anggota. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dorongan motivasi untuk dapat meningkatkan partisipasi anggota.

² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan Dan Kemungkinan* (Jakarta : LP3ES, 2000), p. 196

Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena kualitas pelayanan terhadap anggota dan non anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU), citra koperasi, kurangnya pengetahuan anggota akan perkoperasian, kepuasan anggota, gaya kepemimpinan, dan kinerja pengurus.

Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi salah satunya bisa disebabkan karena rendahnya kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik, cepat dan tepat serta ramah dan menyenangkan akan dapat membuat anggota merasa dihormati. Koperasi hendaknya memperbanyak layanan jasa seperti tabungan haji, KPR, kredit kendaraan bermotor serta jasa-jasa lain yang sekiranya dibutuhkan oleh para anggotanya. Sehingga menambah nilai bagi koperasi itu sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

Selain itu anggota akan semakin giat untuk berpartisipasi pada koperasinya apabila dapat memperoleh manfaat dengan menjadi anggota. Manfaat ini dapat diperoleh anggota melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian SHU didasarkan atas tingkat partisipasi aktif dan jasa dari anggota. Dengan semakin banyaknya anggota berpartisipasi dalam usaha koperasi maka semakin meningkatnya perolehan SHU. Akan tetapi yang terjadi, akibat dari rendahnya pengetahuan anggota tentang perkoperasian, sedikitnya SHU yang diterima anggota menyebabkan keluarnya anggota dari koperasi.

Dalam sebuah koperasi, citra koperasi yang baik sangat mendukung dalam meningkatkan partisipasi anggota. Citra yang baik bagi anggota dinilai dari kesan yang positif terhadap koperasi. Kesan ini diperoleh anggota karena koperasi telah banyak memberikan manfaat bagi anggota dalam menolong kesulitan-kesulitan anggota. Akan tetapi yang terjadi umumnya anggota memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi dinilai sebagai organisasi usaha yang penuh ketidak jelasan, kurang professional dalam pengelolaan dan pada koperasi pegawai kerap kali terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh pengurus sehingga mengakibatkan buruknya citra koperasi.

Pengetahuan anggota tentang koperasi juga dapat menjadi salah satu factor yang dapat meningkatkan partisipasi anggota. Karena dengan memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai koperasi maka anggota pasti paham hak dan kewajibannya sebagai anggota. Serta cara memperoleh manfaat lebih dengan menjadi anggota. Sehingga hal ini akan memotivasi anggota untuk lebih aktif dalam berpartisipasi. Namun sebaliknya apabila anggota minim pengetahuan mengenai koperasi tentu hal ini akan sulit bagi koperasi untuk mendorong anggota agar lebih aktif dalam berpartisipasi.

Kepuasan anggota merupakan tolok ukur bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Apabila anggota merasa puas dengan bergabung bersama koperasi dan dapat memenuhi segala kebutuhan koperasi sehingga anggota puas dengan pelayanan yang diberikan koperasi. Melalui kepuasan tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam menikmati jasa

koperasi serta turut dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan koperasi.

Gaya kepemimpinan dari pengurus juga dapat berpengaruh terhadap partisipasi dari anggota. Koperasi sebagai suatu organisasi memerlukan kepemimpinan pengurus yang solid dan tahu apa yang mesti dilakukannya untuk membawa koperasi kepada tujuannya. Pengurus yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya akan memberikan iklim yang kondusif bagi para anggota untuk menunjukkan partisipasinya.

Pada kenyataannya masalah rendahnya partisipasi anggota disebabkan kredibilitas atau kualitas kinerja pengurusnya yang masih lemah. Oleh karena itu, munculnya berbagai masalah dalam koperasi bisa lebih banyak disebabkan salah urus sebagai akibat dari lemahnya kinerja dari pengurus koperasi. serta kurangnya kesadaran pengurus untuk melakukan pembenahan di dalam koperasi dan kurangnya kerja keras dari pengurus untuk memajukan koperasi. Pengurus koperasi haruslah orang yang professional, kompeten, kreatif dan memiliki inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi.

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh pengurus dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hasil kerja yang kurang baik dari pengurus dapat mempengaruhi kepuasan anggota terhadap koperasi. Jika anggota merasa puas dengan hasil kerja pengurus maka anggota akan cenderung loyal dan meningkatkan partisipasinya.

Kinerja pengurus koperasi dapat dilihat dari program-program kerja yang dilaksanakannya. Kinerja pengurus juga menjadi salah satu factor dalam memajukan koperasi. Dengan semakin baiknya kinerja pengurus maka secara tidak langsung akan membuat anggota puas akan kinerja pengurus koperasi itu sehingga apabila anggota telah puas, anggota tidak ragu untuk berpartisipasi secara aktif.

Data dari situs Kementerian UKM pada tahun 2000 (sayangnya data setelah tahun 2000 tidak ditampilkan) menyebutkan bahwa, jenis koperasi pegawai merupakan jenis paling populer (18.61 persen) dari 38 jenis koperasi yang dikenal di tanah air.³ Karena bagi anggota koperasi pegawai negeri, koperasi merupakan tumpuan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena gaji yang biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 2 minggu pertama saja. Pengurus pada koperasi pegawai sudah pasti merupakan pegawai aktif sehingga tentu saja waktu yang bisa tercurah untuk koperasi sangat terbatas, sehingga kehadiran pengurus sangat minim untuk koperasi. Dengan kondisi pengurus yang sibuk sehingga sulit untuk melakukan kerjasama apabila anggota membutuhkan bantuan pengurus seperti melakukan pinjaman uang. Sedangkan di sisi lain, koperasi sebagai suatu entity bisnis tentunya perlu manajemen yang professional dan kompeten serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai koperasi untuk mengelola operasional harian agar menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya koperasi tentu harus membayar seorang manajer yang mampu bekerja penuh mengelola koperasi. Namun

³ Trimudillah, *Mengelola Koperasi*, <http://trimudillah.wordpress.com/2006/11/30/mengelola-koperasi/> diakses tanggal 20 November 2011

menurut data dari Kementerian UKM hanya 22.7% koperasi pegawai negeri yang mampu membayar seorang manajer.⁴ Selebihnya diurus oleh pengurus sendiri. Kondisi *double job* inilah yang membuat pengurus tidak dapat menciptakan kinerja yang maksimal yang pada akhirnya membuat usaha koperasi kurang berkembang dan apabila ini terjadi tentu akan berpengaruh pada partisipasi anggotanya. Apabila anggota merasa koperasi kurang memberikan manfaat bagi dirinya tentu anggota akan mengurangi tingkat partisipasinya sampai akhirnya keluar dari keanggotaan.

Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur memiliki 2 unit usaha yaitu toko dan simpan pinjam. Pada unit usaha toko menjual berbagai perlengkapan sandang, sembako, elektronik, dan alat tulis Kantor. Pembelian dapat dilakukan baik tunai maupun kredit. Pada unit usaha simpan pinjam koperasi memberikan pelayanan bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dana, pada unit ini pengurus memberikan peraturan baru mengenai pengenaan bunga pinjaman yaitu pada tahun 2009 sebesar 1,1% perbulan menjadi 2% perbulan pada tahun 2010. Namun perubahan ini kurang disambut baik oleh sebagian anggota yang artinya pengurus membuat keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan masukan atau keinginan dari anggota yang pada akhirnya membuat minat anggota untuk meminjam menjadi menurun. Serta penetapan harga yang kurang bersaing, hal ini membuat anggota mengurangi partisipasinya untuk belanja pada toko.

⁴ *Ibid*

Berdasarkan beberapa pelayanan jasa yang telah diberikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota, namun yang terjadi saat ini partisipasi anggota Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur sedang mengalami penurunan. Salah satunya adalah dalam memanfaatkan jasa koperasi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan penurunan tersebut.

Table 1.1
Kontribusi Anggota KPN Walikota Jakarta Timur

Keterangan	Tahun 2009	Tahun 2010	Prosentase
Jumlah pinjaman	Rp 3.196.900.000	Rp 2.185.800.000	31,6%
Jumlah angsuran barang kredit	Rp 174.472.950	Rp 164.666.600	5,6%
Penjualan toko	Rp 181.275.400	Rp 176.042.490	2,9%

Sumber: Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur⁵

Partisipasi anggota koperasi yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada jumlah pinjaman sebesar 31,6%, jumlah angsuran barang kredit sebesar 5,6% serta penjualan toko yang turun sebesar 2,9% . Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi penurunan partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hubungan antara kinerja pengurus dengan partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur.

⁵ Jurnal pengeluaran kas Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur tahun 2009 dan 2010

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat hubungan antara kepuasan anggota dengan partisipasi anggota Koperasi ?
2. Apakah terdapat hubungan antara pengelolaan SHU dengan partisipasi anggota Koperasi?
3. Apakah terdapat hubungan antara citra koperasi dengan partisipasi anggota Koperasi?
4. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang perkoperasian dengan partisipasi anggota Koperasi?
5. Apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan partisipasi anggota Koperasi?
6. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggota Koperasi?
7. Apakah terdapat hubungan antara kinerja pengurus dengan partisipasi anggota Koperasi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas ternyata masalah partisipasi anggota koperasi memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain : dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah : “Hubungan antara kinerja

pengurus dengan partisipasi anggota Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur ?”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ”apakah terdapat hubungan antara kinerja pengurus dengan partisipasi anggota Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur”.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan pemecahan masalah mengenai partisipasi anggota koperasi yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh berbagai pihak.

2. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori yang menyokong ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, sehingga dapat dikembangkan secara terus-menerus oleh penelitian-penelitian selanjutnya.